



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN 2021

**LKPJ
2021**

BAB IV **CAPAIAN KINERJA** **PELAKSANAAN TUGAS** **PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**



bekasikota.go.id



@pemkot_bekasi



@pemkotbekasi

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan yang diterima adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah Pusat kepada daerah, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan sebagian tugas pemerintahan di bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem



desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah.

Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah pusat melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN, maupun dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas beban APBD daerah Provinsi.

4.1.1. IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAHAN TINGKAT ATASNYA

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan beberapa tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kota Bekasi memperoleh tugas pembantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Provinsi Jawa Barat;
2. Dinas Kesehatan Kota Bekasi memperoleh tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan dan Provinsi Jawa Barat;
3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid memperoleh tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan dan Provinsi Jawa Barat;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi memperoleh tugas pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri;
5. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi memperoleh tugas pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian Keuangan;
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi memperoleh tugas pembantuan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;



7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi memperoleh tugas pembantuan dari Kementerian Keuangan;
8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memperoleh tugas pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Provinsi Jawa Barat.

Untuk lebih jelasnya deskripsi mengenai pelaksanaan tugas pembantuan akan kami uraikan berdasarkan Perangkat Daerah penerima tugas Pembantuan sebagai berikut:

4.1.1.1. TARGET KINERJA TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PUSAT

Target Kinerja yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas pembantuan adalah target kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan semua termaktub dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah atas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dibiayai oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
3. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
5. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
7. Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Adapun target kinerja atas pelaksanaan Sub Kegiatan dan Kegiatan tugas pembantuan dapat dilihat pada **Tabel 4.1** berikut:



Tabel 4.1
Target Kinerja Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat
Tahun 2021

NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi	A. Program Pengelolaan Pendidikan		
			1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
			a. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	sekolah	Terselenggaranya bantuan operasional sekolah melalui BOS Reguler sebanyak 356 sekolah
			2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
			a. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	sekolah	Terselenggaranya jumlah siswa yang menerima bantuan Pendidikan BOS Pusat sebanyak 56 sekolah
2	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	BOK Kab/Kota	paket	Tersedianya 1 Paket Kegiatan untuk pelayanan kesehatan di Kab/Kota (1 paket)
			BOK Puskesmas	puskesmas	Tersedianya biaya operasional kesehatan untuk Puskesmas (39 Puskesmas)
			BOK Kefarmasian dan Alkes	instalasi farmasi	Tersedianya biaya distribusi obat, vaksin, BMHP pada instalasi farmasi (1 instalasi farmasi)
			BOK Stunting	tahun	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi dan masyarakat (1 tahun)
			Dukungan Akreditasi Puskesmas	puskesmas terakreditasi	Terlaksananya akreditasi puskesmas (11 puskesmas terakreditasi)



NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
			BOK Stunting (DAK Fisik)	paket, unit	Tersedianya 393 paket alat kesehatan dan 1 unit mobil promkes
			BOK Penguatan Penurunan AKI/AKB (DAK Fisik)	paket, unit	Tersedianya 50 paket sarana prasarana dan 1 unit mobil ambulans
			BOK Pelayanan Dasar (DAK Fisik)	unit	Tersedianya 31 unit sarana <i>coldchain</i>
			BOK Kefarmasian (DAK Fisik)	paket	Tersedianya 18552 paket obat, BMHP, cartridge TCM
			BOK Peningkatan kesiapan Sistem Kesehatan (DAK Fisik)	paket	Tersedianya 25 paket alat kesehatan
3	Kementerian Kesehatan	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	A. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	persen	82.5
			1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
			a. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit, Paket, Tahun	Terealisasinya 41 Unit, 1 Paket, 1 Tahun sarana fasilitas pelayanan kesehatan
				Unit	Teralisasinya 58 Unit Alkes
			b. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Teralisasinya 12 Unit Kendaraan roda 2 pelayanan SITARO
			c. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Teralisasinya 149 unit Alkes
				Unit, paket	Teralisasinya 1 Unit dan 2 Paket Alkes
			d. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	kali	Terpenuhinya pemeliharaan Alkes sebanyak 4 kali



NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
4	Kemendagri Ditjen Dukcapil	Disdukcapil Kota Bekasi	A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
			1. Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			a. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	OB	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Jemput Bola 90 OB
			b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	Tersedianya Toner Printer, Ink Bottle Printer, Ribbon EKTP, HDP Film EKTP dan Mobile Enrollment (5 Jenis)
			c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 50 Kali
			2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jenis	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 4 Jenis
			b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kali	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 2 kali
			3. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD		
			a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kali	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 kali
			b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kali	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 2 kali



NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
5	Kementerian Keuangan (DID)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	Terselenggaranya Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
			1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Koperasi	Terselenggaranya Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota
			a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor kas Koperasi Simpan pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota	Koperasi	Terselenggaranya Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor kas Koperasi Simpan pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota sebanyak 50 koperasi
			B. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	%	Terselenggaranya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
			1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan Kemudahan perijinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Usaha Mikro	Terselenggaranya Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan Kemudahan perijinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
			a. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Lokasi	Terselenggaranya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
			C. Program Pengembangan UMKM	%	Terselenggaranya Pengembangan UMKM
			1. Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi usaha kecil	UMKM	Terselenggaranya Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi usaha kecil



NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
			a. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Design dan Teknologi.	UMKM, orang	Terselenggaranya Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Design dan Teknologi.
	Kementerian Koperasi dan UKM (DAK)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	D. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	%	Terselenggaranya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
			1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan Kemudahan perijinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Usaha Mikro	Terselenggaranya Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan Kemudahan perijinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
			a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Peserta	Terselenggaranya Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
	Kementerian Keuangan (DBHCHT)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	E. Program Penilaian KSP/USP Koperasi	%	Terselenggaranya Penilaian KSP/USP Koperasi
			1. Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Koperasi	Terselenggaranya Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koperasi	Terselenggaranya Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota



NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
			F. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Orang pengurus	Terselenggaranya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
			1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	orang	Terselenggaranya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
			a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	peserta	Terselenggaranya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
			G. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	%	Terselenggaranya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
			1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan Kemudahan perijinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Usaha mikro	Terselenggaranya Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan Kemudahan perijinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
			a. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Lokasi	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
			H. Program Pengembangan UMKM	%	Terselenggaranya Pengembangan UMKM
			1. Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi usaha kecil	UMKM	Terselenggaranya Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi usaha kecil



NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
			a. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Design dan Teknologi.	Event, orang, ruang UMKM	Terselenggaranya Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Design dan Teknologi.
6	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi	A. Program Pembinaan Keluarga Berencana		
			1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		
			a. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Buah, Kali, Paket	Tersedianya Media Luar Ruang, Media Cetak, Media Elektronik, Media Kreatif dan Manajemen BOKB
			b. Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Pertemuan, listrik dan internet	Terpenuhinya operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
			2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
			a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persen	Terlaksananya operasional pelaksanaan pemutakhiran data oleh kader di wilayah kerjanya (672 orang) dan terlaksananya operasional komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) oleh Kader di wilayah kerjanya (1.120 orang)



NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
			3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
			a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes	Terdistribusinya, termonitornya alat dan obat kontrasepsi dan teregistrasikannya fasilitas pelayanan KB dan jejaringnya
			b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Akseptor	Terlaksananya pelayanan KB MKJP
			c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Balai Unit	Terpeliharanya Balai Penyuluhan KB di 7 (tujuh) Kecamatan Tersedianya alat transportasi penyuluh KB
			4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB		
			a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kampung KB, persen	Terlaksananya pertemuan kelompok kerja di Kampung KB (672 orang), terlaksananya mekanisme operasional lini lapangan (720 orang) dan Partisipasi keluarga dalam kegiatan poktan (1200 orang)



NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
			B. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		
			1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
			a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	Tersedia sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB KIT Stunting dan Stunting
			b. Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	Tercapainya pemahaman tentang Kespro dan pencegahan stunting bagi Calon Pengantin (CATIN) Remaja dan pengasuhan 1000 HPK bagi ibu hamil dan orang tua yang memiliki Baduta
7	Kemenkeu	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi	A. Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan		
			1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan pemberdayaan Perempuan		



NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
			a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Orang	Tercapainya Pembinaan dan Pelatihan kelompok PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) sebanyak 100 Orang
8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	A. Program Penataan Bangunan		
			1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung		
			a. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan bangunan gedung daerah Kabupaten/Kota	Unit	Terbangunnya Kantor kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu
				Unit	Terbangunnya Kantor Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria
			B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
			1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
			a. Pembangunan Puskesmas	Unit	Terlaksananya pengembangan/rehab total puskesmas Jatirahayu



NO	KEMENTERIAN/LPNK	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
			C. Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
			1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota		
			a. Perluasan SPAM Jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Titik	Terlaksananya pembangunan sumur dalam dan perluasan SPAM jaringan perkotaan (3 titik)
			b. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan	Titik	Terlaksananya SPAM jaringan perpipaan (5 titik)
			D. Program Pengelolaan Pendidikan		
			1. Pengelolaan pendidikan Sekoah Dasar		
			a. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	RKB (Ruang Kelas Baru)	Terbangunnya USB SD Bojong Rawalumbu 5 Kota Bekasi sebanyak 7 RKB
			2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
			a. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	RKB (Ruang Kelas Baru)	Terbangunnya USB SMP Negeri 45 Kota Bekasi sebanyak 6 RKB
					Terbangunnya USB SMP Negeri 47 Kota Bekasi 6 RKB
					Terbangunnya USB SMP Negeri 48 Kota Bekasi 9 RKB

Sumber : Diolah Tahun 2021



Berdasarkan tabel tersebut diketahui Tugas Pembantaun yang diterima dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pada 8 Perangkat Daerah diterjemahkan kedalam 18 Program, 22 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan.

4.1.1.2. REALISASI TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PUSAT

Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan target yang sudah dijelaskan diatas selanjutnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan pembagian urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah sehingga dalam pelaksanaan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bekasi pada tahun anggaran 2021 sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum.

Pendanaan Tugas Pembantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana pola pertanggungjawaban dalam tugas pembantuan ini pada prinsipnya adalah penerima tugas pembantuan harus bertanggungjawab kepada pemberi penugasan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian/lembaga kepada Pemerintah Kota Bekasi. Rencana alokasi dan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah dimana dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan untuk Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan beban dan jenis penugasan yang diberikan.

Adapun realisasi dari pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bekasi dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 4.2** berikut:



Tabel 4.2
Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat Tahun 2021

NO	KEMENTERIAN /LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi		A. Program Pengelolaan Pendidikan	Kota Bekasi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi							
			1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Bekasi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi							
		Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana bantuan Operasional Sekolah reguler	a. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bekasi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi	356 sekolah	356 sekolah	100	150.552.547.067,00	149.136.490.889,00	99,06	Terselenggaranya bantuan operasional sekolah melalui BOS Reguler sebanyak 356 sekolah
			2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Bekasi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi							
			a. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Bekasi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi	56 sekolah	56 sekolah	100	362.974.446.138,00	357.709.646.865,00	98,55	Terselenggaranya jumlah siswa yang menerima bantuan Pendidikan BOS Pusat sebanyak 56 sekolah
2	Kementerian Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021	BOK Kab/Kota	Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	1 paket	1 paket	100	2.101.840.000,00	1.742.312.900,00	82,89	Tersedianya 1 Paket Kegiatan untuk pelayanan kesehatan di Kab/Kota (1 paket)
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana	BOK Puskesmas	Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	39 puskesmas	39 puskesmas	100	19.174.130.000,00	13.866.422.000,00	72,32	Tersedianya biaya operasional kesehatan untuk Puskesmas (39 Puskesmas)



NO	KEMENTERIAN/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021										
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021	BOK Kefarmasian dan Alkes	Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	1 instalasi farmasi	1 instalasi farmasi	100	181.396.000,00	141.333.000,00	77,91	Tersedianya biaya distribusi obat, vaksin, BMHP pada instalasi farmasi (1 instalasi farmasi)
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021	BOK Stunting	Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	1 tahun	1 tahun	100	835.367.000,00	115.410.000,00	13,82	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi dan masyarakat (1 tahun)
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021	Dukungan Akreditasi Puskesmas	Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	11 puskesmas terakreditasi	11 puskesmas terakreditasi	100	2.356.619.000,00	371.400.000,00	15,76	Terlaksananya akreditasi puskesmas (11 puskesmas terakreditasi)
		Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021	BOK Stunting (DAK Fisik)	Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	393 paket, 1 unit	393 paket, 1 unit	100	4.082.558.000,00	2.936.148.000,00	71,92	Penyediaan Alat Antropometri (390 unit), Sanitarian Kit (3 unit) dan Mobil Promkes (1 unit)
		Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021	BOK Penguatan Penurunan AKI/AKB (DAK Fisik)	Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	50 paket, 1 unit	50 paket, 1 unit	100	12.503.514.000,00	10.207.663.598,00	81,64	Penyediaan Peralatan Gawat Darurat (14 unit), Set Pasca Persalinan (14 unit), Set KIA dan KB (14 unit), Ruang ICU (1 unit), Ruang NICU (2 unit), Ruang



NO	KEMENTERIAN/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Operasi (1 unit), Ruang CSSD (1 unit), Ruang Bersalin (2 unit), Ambulans (1 unit), Alat SI (1 unit)
		Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021	BOK Pelayanan Dasar (DAK Fisik)	Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	31 unit	31 unit	100	635.000.000,00	481.769.420,00	75,87	Instalasi Pengolah Limbah (11 unit), Sarana Cold Chain (20 unit)
		Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021	BOK Kefarmasian (DAK Fisik)	Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	18552 paket	18552 paket	100	9.783.858.250,00	6.857.745.664,00	70,09	Obat (1 paket, BMHP (1 paket), Cartridge TCM (18.550)
		Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021	BOK Peningkatan kesiapan Sistem Kesehatan (DAK Fisik)	Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	25 paket	25 paket	100	1.321.452.000,00	1.052.186.500,00	79,62	Penyediaan Alat Labkesda (1 paket), Analyzer (24 paket)
3	Kementerian Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021	A. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bekasi	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	82.50%	86.65%	105.03	14.807.466.550,00	11.756.311.529,00	79,39	
		Permenkes RI No.8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan TA. 2021	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi				14.807.466.550,00	11.756.311.529,00	79,39	
	DID	Permenkeu RI No. 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Permenkeu No.17/PMK.07/2021	a. Pengadaan fasilitas Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bekasi	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	41 Unit, 1 Paket, 1 Tahun	41 Unit, 1 Paket, 1 Tahun	100	2.206.754.900,00	2.051.980.000,00	92,99	Teralisasinya 41 Unit, 1 Paket, 1 Tahun sarana fasilitas pelayann kesehatan
	DBHCHT	tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa TA. 2021				58 Unit	58 Unit	100	1.288.529.000,00	1.150.869.029,00	89,32	Teralisasinya 58 Unit Alkes



NO	KEMENTERIAN/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya										
	DID		b. Subkegiatan : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bekasi	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	12 Unit	12 Unit	100	192.000.000,00	191.400.000,00	99,69	Teralisasinya 12 Unit Kendaraan roda 2 pelayanan SITARO
	DID		c. Subkegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bekasi	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	149 Unit	149 Unit	100	5.714.182.650,00	4.147.011.500,00	72,57	Teralisasinya 149 unit Alkes
	DAK			Kota Bekasi	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	3 Unit	3 Unit	100	2.660.000.000,00	2,260,051,000,00	84,96	Teralisasinya 1 Unit dan 2 Paket Alkes
	DBHCHT		d. Subkegiatan : Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bekasi	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	4 Kali	4 Kali	100	2,746,000,000,00	1,955,000,000,00	71,19	Terpenuhinya pemeliharaan Alkes
4	Kementerian Dalam Negeri Ditjen Dukcapil	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	A. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Disdukcapil Kota Bekasi							
			1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Disdukcapil Kota Bekasi							
			a. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Bekasi	Disdukcapil Kota Bekasi	90 OB	90 OB	100	312.830.000,00	243.860.000,00	77,95	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Jemput Bola 90 OB
			b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bekasi	Disdukcapil Kota Bekasi	5 Jenis	5 Jenis	100	1.948.800.100,00	1.734.177.860,00	88,99	Tersedianya Toner Printer, Ink Bottle Printer, Ribbon EKTP, HDP Film EKTP dan Mobile Enrollment (5 Jenis)
			c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Disdukcapil Kota Bekasi	50 Kali	50 Kali	100	243.246.900,00	201.526.833,00	82,85	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 50 Kali



NO	KEMENTERIAN/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Disdukcapil Kota Bekasi							
			a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Disdukcapil Kota Bekasi	4 Jenis	4 Jenis	100	697.310.000,00	684.059.000,00	98,1	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 4 Jenis
			b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Disdukcapil Kota Bekasi	2 Kali	2 Kali	100	591.095.000,00	496.111.000,00	83,93	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 2 kali
			3. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kota Bekasi	Disdukcapil Kota Bekasi							
			a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bekasi	Disdukcapil Kota Bekasi	2 Kali	2 Kali	100	47.790.000,00	47.790.000,00	100	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 kali
			b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi	Disdukcapil Kota Bekasi	2 Kali	2 Kali	100	420.000.000,00	420.000.000,00	100	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 2 kali
5	Kementerian Keuangan	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/ PMK. 07/ 2014 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014	A. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kota Bekasi							
			1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi							
			a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi	50 Koperasi	12 Koperasi	24	200.000.000,00	71.752.000,00	35,88	Terselenggaranya pendirian koperasi masjid sebanyak 12 koperasi



NO	KEMENTERIAN/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			kas Koperasi Simpan pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota									
			B. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi							
			1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan Kemudahan perijinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi							
			a. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi	6 Lokasi	5 Lokasi	83,33	600.000.000,00	530.780.500,00	88,46	Terealisasinya jumlah lokasi binaan dan usaha mikro yang ditata sebanyak 5 Lokasi
			C. Program Pengembangan UMKM	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi							
			1. Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi usaha kecil	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi							
			a. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Design dan Teknologi.	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi	250 orang 12 UMKM 50 UMKM 100 UMKM 50 UMKM	244 orang 12 UMKM 50 UMKM 76 UMKM 50 UMKIM	97,60 100 100 76 100	1.434.575.000,00	1.148.030.000,00	80,03	Terealisasinya jumlah peserta pelatihan sebanyak 244 orang, terealisasinya jumlah UMKM kuliner gabus pucung yang



NO	KEMENTERIAN /LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												mendapat bantuan perlengkapan 12 UMKM, terealisasinya jumlah produk yang memperoleh sertifikat halal sebanyak 50 UMKM, Terealisasinya produk yang memperoleh sertifikat PIRT sebanyak 76 UMKM, terealisasinya jumlah UMKM kuliner gabus pucung yang mendapat pemasangan plang sebanyak 50 UMKM
	Kementerian Koperasi dan UKM	Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	D. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi							
			1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan Kemudahan perijinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi							
			a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi	116 Peserta	116 Peserta	100	390.304.000,00	330.503.900,00	84,68	Terealisasinya peserta pelatihan sebanyak 116 peserta
	Kementerian Keuangan	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/ PMK. 07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	E. Program Penilaian KSP/USP Koperasi	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi							



NO	KEMENTERIAN/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1. Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi							
			a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi	25 Koperasi	80 Koperasi	320	199.999.900,00	175.369.800,00	87,68	Terealisasinya penilaian Kesehatan Koperasi sebanyak 80 Koperasi
			F. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi							
			1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi							
			a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi	140 Peserta	140 Peserta	100	200.000.000,00	192.625.000,00	96,31	Terselenggaranya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi sebanyak 140 peserta
			G. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi							
			1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan Kemudahan perijinan, Penguatan	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							



NO	KEMENTERIAN/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Kota Bekasi							
			a. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi	3 Lokasi	2 Lokasi	66,67	200.000.000,00	186.995.000,00	93,50	Terealisasinya jumlah lokasi binaan dan usaha mikro yang ditata sebanyak 2 Lokasi
			H. Program Pengembangan UMKM	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kota Bekasi							
			1. Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi usaha kecil	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kota Bekasi							
			a. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Design dan Teknologi.	Kota Bekasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kota Bekasi	3 event 50 orang 1 ruang 20 UMKM	0 event 50 orang 0 ruang 10 UMKM	0 100 0 50	549.999.800,00	25.613.800,00	4,66	Terselenggaranya pelatihan sebanyak 50 orang, terselenggaranya UMKM yang mengikuti pameran sebanyak 10 UMKM
6	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Peraturan BKKBN RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana BOKB Tahun 2021	A. Program Pembinaan Keluarga Berencana	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
		Peraturan BKKBN RI Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang KB Tahun 2021	1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Bekasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
			a. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kota Bekasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Media KIE 674 buah - Media elektronik 21 kali	- Media KIE 674 buah - Media elektronik 21 kali	100	174.363.000,00	168.013.300,00	96,36	Tersedianya Media Luar Ruang, Media Cetak, Media Elektronik, Media Kreatif dan Manajemen BOKB



NO	KEMENTERIAN/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						- Media online 1 Paket - Logistik 17 Jenis - Sosialisasi dan rapat 3 kali - Monev 12 balai, 17 Kp KB dan 12 Poktan	- Media online 1 Paket - Logistik 17 Jenis - Sosialisasi dan rapat 3 kali - Monev 12 balai, 17 Kp KB dan 12 Poktan					
			b. Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Bekasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Operasional Penyuluhan KB 72 kali - Operasional Pembinaan Kader 36 kali - Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan 36 kal - Pengelolaan Data 72 kali - Langganan Internet - Token listrik	- Operasional Penyuluhan KB 72 kali - Operasional Pembinaan Kader 36 kali - Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan 36 kal - Pengelolaan Data 72 kali - Token listrik	100	883.728.000,00	687.994.655,00	77,85	Terpenuhinya operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
			2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)									
			a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Bekasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Meningkatkan klasifikasi IMP dari berkembang ke mandiri - Meningkatkan orientasi tenaga lini lapangan	- Meningkatkan klasifikasi IMP dari berkembang ke mandiri - Meningkatkan orientasi tenaga lini lapangan	100	268.800.000,00	268.800.000,00	100	Terlaksananya operasional pelaksanaan pemutakhiran data oleh kader di wilayah kerjanya (672 orang) dan terlaksananya operasional komunikasi,



NO	KEMENTERIAN/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												informasi dan Edukasi (KIE) oleh Kader di wilayah kerjanya (1.120 orang)
			3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota									
			a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Bekasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Pendistribusian Alkon ke 501 Fasyan, Jaringan dan jejaring - Monev distribusi 668 kali - Registrasi fasilitas pelayanan KB 167 Faskes	- Pendistribusian Alkon ke 501 Fasyan, Jaringan dan jejaring - Monev distribusi 668 kali - Registrasi fasilitas pelayanan KB 167 Faskes	100	393.953.000,00	180.057.000,00	45,71	Terdistribusinya, termonitornya alat dan obat kontrasepsi dan teregistrasikannya fasilitas pelayanan KB dan jejaringnya
			b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Bekasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan kesertaan ber KB MKJP 2.372 Akseptor	Peningkatan kesertaan ber KB MKJP 2.372 Akseptor	100	1.207.685.000,00	608.470.100,00	50,38	Terlaksananya pelayanan KB MKJP
			c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Bekasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7 Balai 2 Unit Kendaraan roda 2	7 Balai 2 Unit Kendaraan Roda 2	100	1.647.403.200,00	1.602.360.470,00	97,27	Terpeliharanya Balai Penyuluhan KB di 7 (tujuh) Kecamatan Tersedianya alat transportasi penyuluh KB
			4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB									
			a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Bekasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Kelengkapan data dan laporan rumah data (17 Kp KB)	- Kelengkapan data dan laporan rumah data (17 KP KB)	100	611.040.000,00	611.040.000,00	100	Terlaksananya pertemuan kelompok kerja di Kampung KB (672 orang), terlaksananya



NO	KEMENTERIAN/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												mekanisme operasional lini lapangan (720 orang) dan Partisipasi keluarga dalam kegiatan poktan (1200 orang)
			B. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									
			1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
			a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Bekasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- 12 Unit BKB Kit Stunting - 25 Unit Kit Siap Nikah Anti Stunting	- 12 Unit BKB Kit Stunting - 25 Unit Kit Siap Nikah Anti Stunting	100	478.000.000,00	451.090.000,00	94,37	Tersedia sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB KIT Stunting dan Stunting
			b. Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Bekasi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya pemahaman kespro dan pencegahan stunting bagi CATIN Remaja dan pengasuhan 1000 HPK bagi ibu hamil dan baduta (1.500 orang)	Meningkatnya pemahaman kespro dan pencegahan stunting bagi CATIN Remaja dan pengasuhan 1000 HPK bagi ibu hamil dan baduta (1.500 orang)	100	609.500.000,00	602.000.000,00	98,77	Tercapainya pemahaman tentang Kespro dan pencegahan stunting bagi Calon Pengantin (CATIN) Remaja dan pengasuhan 1000 HPK bagi ibu hamil dan orang tua yang memilik Baduta
7	Kemenkeu	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum	A. Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan	Kota Bekasi	DPPPA Kota Bekasi	100 Orang	100 Orang	100				



NO	KEMENTERIAN/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pembangunan Industri Rumah-rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan										
			1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan pemberdayaan Perempuan	Kota Bekasi	DPPPA Kota Bekasi							
			a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Kota Bekasi	DPPPA Kota Bekasi	100 Orang	100 Orang	100	150.000.000,00	147.715.000,00	98,47	Tercapainya Pembinaan dan pelatihan kelompok PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) sebanyak 100 Orang
8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		A. Program Penataan Bangunan	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi							
			1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi							
		Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no 24/PRT/M/2016 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah di Direktorat Jendral Cipta Karya	a. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Rawalumbu	Disperkimtan Kota Bekasi	1 Unit	1 Unit	100	2.288.631.000,00	2.140.188.500,00	93,51	Terbangunnya Kantor Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu
				Medansatria	Disperkimtan Kota Bekasi	1 Unit	1 Unit	32,4	2.288.631.000,00	669.817.540,00	30,58	Terbangunnya Kantor Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria



NO	KEMENTERIAN/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat									
			1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi							
			a. Pembangunan Puskesmas	Pondok Melati	Disperkimtan Kota Bekasi	1 Unit	1 Unit	100	400.000.000,00	347.325.000,00	86,83	Terlaksananya Pengembangan/ Rehab Total Puskesmas Jatirahayu
			C. Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum									
			1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi							
		Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021	a. Perluasan SPAM Jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi	3 Titik	3 Titik	100	4.921.900.000,00	4.526.920.050,00	91,98	Terlaksananya Pembangunan Sumur dalam dan Perluasan SPAM Jaringan Perkotaan
			b. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi	5 Titik	5 Titik	100	5.780.250.175,00	5.263.371.800,00	91,06	Terlaksananya SPAM Jaringan Perpipaan di Perkotaan
			D. Program Pengelolaan Pendidikan									
			1. Pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar									
			a. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi	7 RKB	7 RKB	100	2.200.000.000,00	1.985.357.400,00	90,24	Terbangunnya USB SD Bojong rawalumbu 5 Kota Bekasi



NO	KEMENTERIAN/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no 24/PRT/M/2016 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah di Direktorat Jendral Cipta Karya	2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
			a. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi	6 RKB	4 RKB	73,70	2.620.549.192,00	1.184.518.331,00	45,20	Terbangunnya USB SMP Negeri 45 Kota Bekasi sebanyak 6 RKB
				Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi	6 RKB	6 RKB	84,12	2.497.087.000,00	1.997.367.799,00	79,99	Terbangunnya USB SMP Negeri 47 Kota Bekasi 6 RKB
				Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi	9 RKB	9 RKB	100	5.124.398.000,00	4.393.663.000,00	85,74	Terbangunnya USB SMP Negeri 48 Kota Bekasi 9 RKB

Sumber : Diolah Tahun 2021



Berdasarkan tabel tersebut terdapat capaian kinerja yang melampaui target dari yang direncanakan yaitu pada DiskopUKM Kota Bekasi pada sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang semula direncanakan 25 koperasi teralisasi menjadi 80 koperasi dengan persentase capaian 320%, sementara untuk sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor kas Koperasi Simpan pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota capaian realisasi yang direncanakan sebanyak 50 koperasi teralisasi menjadi 12 koperasi dengan persentase capaian 24%.

4.1.1.3. TARGET KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah atas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan pembagian urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah sehingga dalam pelaksanaan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Rencana alokasi dan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah dimana dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran pemerintah provinsi yang dialokasikan untuk Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan beban dan jenis penugasan yang diberikan.

Target Kinerja tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bekasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebagaimana **Tabel 4.3** berikut:



Tabel 4.3
Target Kinerja Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

NO	SUMBER KEUANGAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat	Dinas Pendidikan Kota Bekasi	A. Program Pengelolaan Pendidikan		
			1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		Dinas Pendidikan Kota Bekasi	a. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah	Terlaksananya blue print perencanaan dan pengembangan smart school di kota Bekasi sebanyak 1 sekolah
2	Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat	Dinas Kesehatan Kota Bekasi	A. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
			1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			a. Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jiwa	Terlaksananya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat untuk 235.371 jiwa
3	Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	A. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persen	82.5
			1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
			a. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Teralisasinya 99 Unit Alkes (100 persen)



NO	SUMBER KEUANGAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
4	Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	A. Program penataan bangunan gedung		
			1. Penyelenggaraan bangunan Gedung di Wilayah Daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung		
			a. Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Unit	Terbangunnya Alun-Alun jalan Veteran Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 1 unit
				Unit	Terbangunnya <i>creative center</i> jalan lapangan multiguna Kelurahan Margahayu sebanyak 1 unit
				Unit	Terbangunnya pasar Kelurahan Harapanjaya sebanyak 1 unit

Sumber : Diolah Tahun 2021



4.1.1.4. REALISASI TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI

Pemerintahan Kota Bekasi tidak hanya menyelenggarakan apa yang menjadi urusan daerah, tapi juga melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di atasnya dalam hal ini Provinsi Jawa Barat yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Bekasi. Dana Tugas Pembantuan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat yang penggunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi sebagai penerima penugasan dalam kerangka tugas pembantuan, adapun pelaksana kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang mendapat Tugas Pembantuan dari Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
2. Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
3. RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dan pelaksanaan penugasan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan. Perangkat Daerah yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Tugas Pembantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban.

Adapun realisasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 4.4** berikut:



Tabel 4.4
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

NO	SUMBER KEUANGAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat		A. Program Pengelolaan Pendidikan	Kota Bekasi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi							
			1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Bekasi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi							
		Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata cara penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	a. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Bekasi	Dinas Pendidikan Kota Bekasi	1 sekolah	0 sekolah	0	1.500.000.000,00	0,00	0	Tidak Terlaksananya <i>blue print</i> perencanaan dan pengembangan <i>smart school</i> di kota Bekasi, dikarenakan Pagu dialihkan untuk penanganan Covid 19.
2	Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021	A. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bekasi	Dinas Kesehatan							
			1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			a. Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			235.371 Jiwa	123.021 Jiwa	52,27	14.144.986.800,00	14.144.961.600,00	99,9	Terlaksananya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat untuk 235.371 jiwa



NO	SUMBER KEUANGAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (%)	KETERANGAN
						TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat	Peraturan Daerah Provinsi Jabar No.4 Tahun 2020 tentang APBD TA.2021	A. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Bekasi	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	82.50%	86.65%	105,03	47.116.138.177,00	47.101.407.800,00	99,97	
		Peraturan Gubernur No 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA.2020	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi				47.116.138.177,00	47.101.407.800,00	99,97	
			a. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			99 Unit	99 Unit	100	47.116.138.177,00	47.101.407.800,00	99,97	Teralisasinya 99 Unit Alkes
4	Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat		A. Program penataan bangunan gedung	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi							
			1. Penyelenggaraan bangunan Gedung di Wilayah Daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Kota Bekasi	Disperkimtan Kota Bekasi							
		Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 4 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021	a. Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Bekasi Selatan	Disperkimtan Kota Bekasi	1 Unit	1 Unit	100	15.286.924.000,00	14.479.035.000,00	94,72	Terbangunnya Alun-Alun jalan Veteran Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 1 unit
				Bekasi Timur		1 Unit	1 Unit	100	9.795.756.000,00	8.892.357.900,00	90,78	Terbangunnya creative center jalan lapangan multiguna Kelurahan Margahayu sebanyak 1 unit
				Bekasi Utara		1 Unit	1 Unit	100	15.000.000.000,00	14.284.473.000,00	95,23	Terbangunnya pasar Kelurahan Harapanjaya sebanyak 1 unit

Sumber : Diolah Tahun 2021



Berdasarkan tabel capaian kinerja tugas pembantuan tersebut Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi tidak dilaksanakan karena Pagu dialihkan untuk penanganan Covid 19. Sementara capaian kinerja Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang semula ditargetkan untuk 235.371 jiwa terealisasi sebanyak 123.021 jiwa sehingga capaiannya hanya 52,27%. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dan Sub Kegiatan Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sudah terealisasi 100%.

4.1.2. IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA TINGKATAN PEMERINTAH DIBAWAHNYA

Pemerintah Kota Bekasi tidak memberikan tugas Pembantuan pelaksanaan urusan pemerintahan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya, karena pemerintah kota Bekasi tidak memiliki desa sebagai daerah otonom pelaksanaan tugas pembantuan.

4.2. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan tugas pembantuan tahun 2021 di Kota Bekasi, terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah diantaranya:

1. Adanya refocusing anggaran dari Kementerian teknis pemberi tugas pembantuan dan penugasan maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disebabkan pandemi COVID-19 berdampak penyesuaian alokasi anggaran terhadap Program, Kegiatan, Sub Kegiatan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;



2. Kurang optimalnya koordinasi antar pengelola kegiatan pada Kementerian teknis pemberi tugas pembantuan dan penugasan ataupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pengelola kegiatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi berdampak pada lamanya proses penyelesaian masalah yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan;
3. Belum terintegrasinya pelaporan kinerja berbasis aplikasi e-Monev baik tingkat Kota Bekasi maupun dengan Provinsi dan Kementerian/LPNK pemberi Tugas Pembantuan dan Penugasan yang mengakibatkan penginputan data capaian kinerja dilakukan secara terpisah dengan aplikasi yang berbeda sehingga perlu dilakukan integrasi aplikasi (*interoperabilitas*) data target maupun capaian realisasi kinerja dan keuangan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan atau Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan di Kota Bekasi, kami menyampaikan beberapa saran upaya penyelesaian hambatan/permasalahan diatas sebagai berikut:

1. Konsultasi, koordinasi dan komunikasi secara aktif kepada Kementerian teknis pemberi tugas pembantuan ataupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga informasi terkait perubahan kebijakan dan *refocusing* anggaran dapat segera ditindaklanjuti secara cepat, terarah dan terukur baik dari segi administrasi maupun secara teknis di lapangan serta pemenuhan persyaratan teknis dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Kerjasama yang baik antar pengelola kegiatan dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan sehingga permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dapat segera ditindaklanjuti penyelesaiannya;
3. Integrasi aplikasi *e-monev* Kota Bekasi dengan Kementerian/LPNK dan Provinsi yang memberikan tugas pembantuan dan penugasan perlu dilakukan dengan membangun kerjasama dalam bidang pemanfaatan informasi teknologi (IT) antar kedua belah pihak agar



terjadi penyamaan persepsi baik penghitungan data target dan capaian realisasi baik kinerja maupun keuangan dalam melaksanakan evaluasi pelaporan berbasis teknologi.

